PERANAN DAN EKSISTENSI YURISPRUDENSI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Junaedi¹

Fakultas Hukum Universitas Gunung Jati Cirebon

E-mail: junaedi@ugj.ac.id

Citation: Junaedi. Peran dan Eksistensi Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 1.1.2023. 1-16.

Submitted: 30-12-2022

Revised: 28-01-2023

Accepted: 01-02-2023

Abstrak

Memahami akan pentingnya yurisprudensi kaitannya dengan peran hakim dalam memproses sebuah perkara di pengadilan, ini semua menandakan bahwa yurisprudensi adalah bagian yang tidak terpisahkan saat hakim memproses sebuah perkara untuk mengambil suatu keputusan disaat aturan hukum tertulisnya tidak tercantum secara tekstual. Dan ini pun merupakan asas kebebasan bertindak bagi hakim, disaat teks hukumnya tidak mengatur secara konkrit, ini semua dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum. Namun yang perlu diperhatikan adalah asas kebebasan bertindak (*freies ermessen/diskresi*) bagi seorang pejabat negara (hakim), tidak boleh bertindak sebebas kehendak diri, namun kebebasan bertindak itu harus menghasilkan keputusan hukum yang berpedoman pada nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian untuk dapat dirasakan oleh semua komponen masyarakat. Dengan demikian, peranan dan eksistensi yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia sangat diharapkan untuk membangun dan menegakan hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itulah muncul sebuah persoalan hukum, bagaimana peranan dan eksistensi yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia? Inilah butuh sebuah penalaran hukum yang tegas, jelas, dan konkrit agar sejatinya hukum pada praktiknya dapat tersentuh oleh semua lapisan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Peranan Yurisprudensi, Eksistensi Yurisprudensi

Abstract

*Understanding the importance of jurisprudence in relation to the role of judges in processing a case in court, this all indicates that jurisprudence is an inseparable part when a judge processes a case to make a decision when the written legal rules are not textually stated. And this is also the principle of freedom of action for judges, when the legal text does not stipulate concretely, this is all done to fill the legal vacuum. However, what needs to be considered is the principle of freedom of action (*freies ermessen / discretion*) for a state official (judge), may not act as freely as he or she wills, but the freedom to act must result in legal decisions that are guided by the value of control, the value of benefit and the value of certainty to be able to do so. felt by all components of society. Thus, the role and existence of jurisprudence in the legal system in Indonesia is highly expected to build and enforce social justice laws for all Indonesian people. For this reason, a legal problem arises, what is the role and existence of jurisprudence in the Indonesian legal system? This requires a firm, clear, and concrete legal reasoning so that in practice the law can be touched by all levels of Indonesian society.*

Keywords: *The Role of Jurisprudence, The Existence of Jurisprudence*

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan kaidah-kaidah yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga memberikan konsekuensi hukum harus ditaati dan dipatuhi tanpa terkecuali. Sejalan dengan perkembangan zaman, hukum senantiasa selalu dihadapkan oleh perubahan-perubahan sosial baik dalam konteks perubahan sosial yang terjadi pada kehidupan individu, kehidupan bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, perubahan-perubahan itu memberikan dampak secara langsung atau pun sebaliknya akan mempengaruhi pada perubahan sistem hukum. Sehingga akan membentuk atau mengkonstruksi sifat dan watak hukum serta peranannya dalam kehidupan masyarakat serta adanya tuntutan-tuntutan masyarakat yang didorong oleh berbagai faktor, hal ini bisa kita temukan pada pengaruh timbal balik diantara perubahan sosial dan hukum.¹

Apabila hukum selalu dihadapkan pada perubahan-perubahan sosial, maka hukum akan memberikan salah satu tempat dari dua fungsi hukum utama. *Pertama*; hukum bisa dikatakan berfungsi sebagai kontrol atas perubahan sosial yang terjadi di masyarakat (*taal of social control*). *Kedua*; hukum berperan sebagai sarana perubahan dalam masyarakat (*taal of social engineering*). Kedua fungsi hukum itu muncul sebagai akibat tidak harmonisnya dinamika sosial dan dinamika hukum pada kehidupan masyarakat. Praktisnya, terkadang perkembangan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat yang begitu kompleks, namun di lain sisi adakalanya perkembangan masyarakat tertinggal oleh perkembangan hukum yang begitu pesat. Ketidakharmonisan antara perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum akan melahirkan sebuah kepingangan ial (*social lag*). Dengan demikian, jika perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial yang begitu kompleks, maka ada tuntutan harus diadakan pembaruan materi hukum untuk memenuhi kebutuhan hukum di kalangan masyarakat. Sedangkan sebaliknya, apabila hukum yang begitu kompleks dan maju, sedangkan perkembangan sosial yang stagnan, sehingga materi-materi hukum tidak perlu untuk dirubah, akibatnya hukum perlu ditegakkan untuk mengatur kehidupan masyarakat, intinya penegakan hukum harus diutamakan dalam kehidupan masyarakat.

Pada aspek praktik hukum di lingkungan peradilan, muncul akan istilah yurisprudensi yang ditimbulkan oleh keputusan pengadilan, khususnya putusan pengadilan di tingkat tertinggi yakni Mahkamah Agung. Hasil putusan-putusan dari Mahkamah Agung itu tidak langsung akan menimbulkan hukum, akan tetapi hanya sebatas faktor dalam upaya pembentukan hukum baru. Dikatakan yurisprudensi, apabila putusan-putusan dari Mahkamah Agung itu diikuti oleh pengadilan di tingkat bawahnya sebagai kebiasaan yang dilakukan berulang kali.² Mengacu pada pendapat di atas, dapat dipahami bahwa yurisprudensi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam memutuskan perkara yang serupa. Yurisprudensi merupakan nilai-nilai hukum baru yang tidak terdapat dalam undang-undang, oleh sebab itu mempelajari yurisprudensi sangatlah penting, di samping yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum formil yang diakui

¹ Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), 76.

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1993), 158.

oleh pemerintah. Jadi, memahami hukum dalam perundang-undangan saja tanpa mempelajari yurisprudensi, tidaklah lengkap.

Yurisprudensi sebagai tindakan para hakim dalam memutus perkara yang tidak ada aturannya secara tertulis, sehingga hakim pun bertindak untuk segera memproses hukum demi mencegah terjadinya kekosongan hukum, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan bersama. Menurut Utrecht, bahwa keputusan hakim di luar undang-undang atau hukum tertulis pada sebuah persidangan, kemudian putusan itu dijadikan rujukan oleh hakim lainnya pada kasus yang serupa, maka keputusan hakim yang pertama itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum oleh hakim lainnya.³ Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Soepomo, ia mengatakan bahwa yurisprudensi dari hakim atasan merupakan sumber penting bagi hakim bawahan dalam menemukan hukum obyektif. Pada dasarnya seorang hakim tidak terikat oleh keputusan hakim lain, namun dalam praktiknya hakim yang bertugas diderah (bawah), harus patuh pada hakim yang berkedudukan di pusat (MA), oleh karena itu hakim daerah tetap harus memperhatikan akan keputusan dari hakim pusat, terutama dalam banding maupun keputusan kasasi.⁴

Memahami akan pentingnya yurisprudensi kaitannya dengan peran hakim dalam memproses sebuah perkara di pengadilan, ini semua menandakan bahwa yurisprudensi adalah bagian yang tidak terpisahkan saat hakim memproses sebuah perkara untuk mengambil suatu keputusan disaat aturan hukum tertulisnya tidak tercantum secara tekstual. Dan ini pun merupakan asas kebebasan bertindak bagi hakim, disaat teks hukumnya tidak mengatur secara konkrit, ini semua dilakukan untuk kemaslahatan hukum yang bermaslahat untuk masyarakat. Namun yang perlu diperhatikan adalah asas kebebasan bertindak (*freies ermeseen/diskresi*) bagi seorang pejabat negara (hakim), tidak boleh bertindak sebebaskan kehendak diri, namun kebebasan bertindak itu harus menghasilkan keputusan hukum yang berpedoman pada nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian untuk dapat dirasakan oleh semua komponen masyarakat. Dengan demikian, peranan dan eksistensi yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia sangat diharapkan untuk membangun dan menegakkan hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itulah muncul sebuah persoalan hukum, bagaimana peranan dan eksistensi yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia? Inilah butuh sebuah penalaran hukum yang tegas, jelas, dan konkrit agar sejatinya hukum pada praktiknya dapat tersentuh oleh semua lapisan masyarakat Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini *library research*⁵ karena obyek yang dikaji adalah dokumen yang merupakan data sekunder. Fokus kajian penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut penelitian hukum normatif karena yang diteliti adalah hukum dari aspek teoritis atau normatif, tidak sampai mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah filosofis. Pendekatan filosofis yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai perangkat nilai ideal yang harus menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan,

³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 165.

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 166.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 15.

dan pelaksanaan hukum. Pendekatan filosofis digunakan karena kajian ini sifatnya ideal dengan menggunakan cara pandang filsafat hukum yang memandang hukum sebagai *law in ideas* atau *ius constituendum*. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh oleh peneliti secara langsung atau berasal dari pihak lain berupa dokumen yang telah tertulis. Peneliti memperoleh data melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan bentuk analisis dengan memaknai dan mendeskripsikan data melalui kata-kata secara naratif dengan logika ilmiah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Peranan Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia

Secara umum negara-negara yang menganut sistem eropa kontinental (*civil law*), istilah yurisprudensi sering sering diartikan sebagai putusan-putusan hakim dan mendapatkan kekuatan hukum tetap, dan diikuti oleh hakim-hakim lainnya pada kasus yang sama. Ada pula yang mengartikan yurisprudensi sebagai kumpulan hukum (*rechtersrecht*) atau sebuah hukum yang ditimbulkan oleh putusan-putusan hakim atau lembaga peradilan. Sedangkan di negara-negara yang menganut sistem hukum common law (*anglo saxon*), "*yurisprudence*" diartikan sebagai ilmu pengetahuan hukum yang di dalam mengenai prinsip-prinsip hukum positif dan hubungan-hubungan hukum. Sedangkan putusan-putusan hakim tingkat tinggi yang diikuti secara tetap oleh badan peradilan dibawahnya pada akhirnya menjadi bahagian dari ilmu pengetahuan hukum, maka dikenal sebagai "*Case-law*" disebut juga sebagai "*judge made law*".⁶

Pada konteks Indonesia, sebagai negara bekas koloni Belanda, sehingga secara langsung Indonesia terpengaruh oleh sistem hukum *civil law*, (*eropa kontinental*). Pada konteks yang demikian inilah, bahwa yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia diartikan sebagai putusan-putusan hakim atau badan peradilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap, dimana putusan itu telah diikuti oleh hakim atau badan peradilan yang dibawahny pada kasus yang sama. Pada praktik peradilan, tidak ada secara tegas dan konkrit sebuah statemen resmi yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga peradilan mengenai pengertian yurisprudensi. Tetapi pada berbagai pelatihan atau symposium tentang hukum, Mahkamah Agung memberikan penjelasan bahwa yurisprudensi adalah hanyalah putusan Mahkamah Agung, dimana putusan-putusan Mahkamah Agung terhimpun dalam sebuah bentuk buku. Dengan demikian yurisprudensi dapatlah diartikan: *pertama*; sebuah ilmu yang menganut tentang penerapan undang-undang peradilan, dan *kedua*; sebuah kumpulan atau himpunan putusan-putusan peradilan, yang diikuti oleh para hakim untuk mengadili dan memutuskan dalam perkara atau kasus yang sama.⁷

Sejalan dengan itu semua keputusan hakim dapatlah dikatakan sebagai bagian dari sumber hukum formal, sehingga yurisprudensi memiliki kedudukan yang begitu

⁶ Paulus Efendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997/1998), 6-7.

⁷ Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedia Hukum Islam Indonesia*, Jilid II Cet. I, (Jakarta: PT Ichtiar Baru-van Hoeve, 1996).

urgen apabila dikaitkan dengan eksistensi hakim dalam tugas dan kewenangannya. Sebaliknya peranan yurisprudensi, bila dikorelasikan dengan aliran legalisme maka peranan yurisprudensi kurang begitu urgen disebabkan bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang oleh sebab itu, maka hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait oleh undang-undang, sehingga hakim bisa dikaitkan sebagai pelaksana undang-undang.⁸

Berbicara peranan yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia, pandangan ini tidak terlepas ada tiga aliran hukum yang memberikan ruang untuk timbulnya yurisprudensi dalam menciptakan hukum baru yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Ada tiga aliran hukum kaitannya dengan yurisprudensi, yakni:

a) Aliran Legisme

Aliran legisme dikenal pula dengan sebutan aliran formalitas, analitis jurisprudensi dan positivistik. Aliran hukum ini berkembang pada abad ke-19, ia tumbuh sebagai reaksi atas ketidakseragaman hukum kebiasaan yang berlaku pada waktu itu. Solusinya adalah dengan mengkodifikasinya dalam satu kumpulan peraturan yang diberlakukan secara umum. Tujuan dari pengkodifikasian itu adalah untuk kesederhanaan, kepastian, dan unifikasi hukum.

Dalam perkembangannya, aliran ini kemudian menutup diri pada satu ketentuan bahwa yang dapat disebut sebagai hukum adalah perundang-undangan (*wetgeving*). Sebab undang-undang yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia yang pernah terjadi. Karena pemikiran semacam ini, menuntun bahwa setiap perbuatan yang dianggap melanggar hukum dapat dihukum apabila memenuhi rumusan-rumusan hukum yang tertera dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 1980, hukum kebiasaan merupakan sumber hukum yang tidak tertulis, karena sifatnya yang tidak tertulis itu, makannya sering timbul ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Kemudian muncul sebuah usaha untuk menjamin akan kepastian hukum itu, dengan membentuk usaha untuk menyatukan hukum serta menuliskannya ke dalam sebuah buku atau kitab undang-undang (*codex*). Pada akhirnya timbulnya pentingnya hukum kebiasaan itu untuk dikodifikasikan, maka lahirlah gerakan kodifikasi hukum yang melatarbelakangi lahirnya aliran legisme. Aliran legisme ini secara tegas menyebutkan bahwa, sumber hukum utama adalah undang-undang, di luar undang-undang bukanlah hukum, sehingga hukum identik dengan undang-undang. Pada akhirnya hakim hanya sebatas berkewajiban untuk menjalankan undang-undang, sehingga peranan hakim akan menjadi pasif.⁹

Posisi hakim sebagai aparaturnya penegak hukum wajib terikat pada diktum-diktum peraturan perundangan, dan hakim tidak diperkenankan untuk mendasarkan pada pemikiran-pemikiran bahkan norma-norma lain

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 65.

⁹ Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), 90.

yang sebenarnya bisa dimungkinkan untuk dijadikan sebagai hukum yang lebih tepat, atau dengan kata lain penegakan hukum dapatlah memberikan manfaat dan rasa keadilan bagi masyarakat. Lembaga peradilan hanya menjamin agar mekanismendari ketentuan undang-undang berkesesuaian secara silogisme terhadap kejadian-kejadian yang konkrit (kasus).

Menurut mazhab legisme bahwa tidak ada aturan hukum selain undang-undang yang tertulis, undang-undang dianggap mampu untuk mengatasi berbagai persoalan hukum yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Sejauh ini pengaruh aliran legisme sangat kuat mempengaruhi berbagai sistem hukum yang berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berasal dari aliran hukum legisme ini, muncul asas hukum yang disebut asas legalitas atau *principle of legality*, satu asas yang paling fundamental dalam sistem hukum pidana negara-negara Eropa Kontinental. Asas legalitas ini dirumuskan dalam bahasa Latin: “*Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poinali*”, yang artinya bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.¹⁰ Asas legalitas ini telah berlaku di berbagai negara yang menggunakan hukum pidana yang telah dikodifikasi dalam suatu “*wetboek*” seperti negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Asas ini juga termuat dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948 pada Pasal 11. Sudah barang tentu Indonesia yang 350 tahun dijajah oleh Belanda bercorak Eropa Kontinental, mendasarkan asas konkordasi menerjemahkan dan memberlakukan *wetboek van stravrecht* ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Prinsip legalitas itu tertera jelas dan tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari perbuatan itu”.

Contoh berfikir hukum dalam perspektif aliran legisme sebagai berikut: “Nenek Minah mencuri 2 (dua) buah biji kakao (kasus tahun 2009), nenek Minah ketangkap dan didakwa dengan Pasal 362 tentang pencurian “*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah*”. Dalam persidangan, hakim melakukan pencocokan antara perbuatan dan formulasi aturan hukum yang ada dalam KUHPidana, bila ada kecocokan, selanjutnya hakim menentukan hukuman apa dan berapa lama bagi pelaku tindak pidana. Akhirnya nenek Minah dihukum 1 bulan 15 hari. Dari contoh kasus ini, hakim hanya menyuarkan apa yang tertera dalam KUHPidana dengan menutup mata pada pertimbangan-pertimbangan lain, pertimbangan-

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, 1990), 22.

pertimbangan hakim yang ada juga sekedar menyesuaikan apa yang ada di dalam peraturan perundangan lainnya seperti KUHAP.

Begitulah silogisme ataupun cara kerja ilmu hukum beraliran legisme atau positivistik. Paham positivism, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang obyektif sebagai norma-norma yang positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkrit antara warga masyarakat atau wakil-wakilnya. Di sini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lege* atau *lex*, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum, dan apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.

b) Aliran *Freie Rechtlehre* (*Freie Rechtsbewegung*)

Freie Rechtlehre merupakan aliran atau mazhab yang bertolak belakang dari aliran legisme. Perlu anda ketahui bahwa ketidakmampuan lembaga legislatif untuk selalu meremajakan atau memperbarui undang-undang, sehingga berakibat hukum selalu ketinggalan dari peristiwa dan tidak bisa mengikuti dinamika masyarakat, telah merupakan alasan untuk memberi peran aktif pada hakim. Sehingga munculah aliran *Freie Rechtlehre* (1840) sebagai reaksi terhadap kekurangan aliran legisme yang ternyata tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan baru.

Aliran *Freie Rechtlehre* merupakan aliran bebas, karena tidak selalu mengandalkan hukum (undang-undang) buatan lembaga legislatif. Tentu anda masih ingat uraian sebelumnya yang menyebutkan bahwa pada aliran legisme setiap hakim terikat pada undang-undang, hal ini sangat bertolak belakang dengan aliran *Freie Rechtlehre*. Karena menurut pandangan *freie rechtlehre*, hakim bebas berimprovisasi menentukan atau menciptakan hukum, dan juga bebas untuk menyimpangi undang-undang yang sudah tidak relevan lagi. Hal ini disebabkan *freie rechtlehre* berpendapat bahwa pekerjaan hakim adalah melakukan penciptaan hukum. Sehingga pemahaman terhadap yurisprudensi merupakan hal yang primer dalam mempelajari hukum, sedangkan undang-undang merupakan hal yang sekunder. Pada aliran *Freie Rechtslehre* ini, hakim benar-benar berfungsi sebagai pencipta hukum (*judge made law*), karena keputusan yang dibuat pasti berdasarkan pada keyakinan hakim. Keputusan hakim juga lebih bersifat dinamis serta *up to date*, karena selalu mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Di samping itu hukum hanya terbentuk oleh lembaga peradilan (*rechts-spraak*). Sehingga undang-undang, kebiasaan dan sebagainya hanya difungsikan para hakim sebagai sarana saja dalam membentuk/menciptakan atau menemukan hukum pada kasus-kasus yang konkrit.¹¹

¹¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 88.

Aliran ini adalah anti tesis dari aliran legisme, sama sekali menentang apa yang menjadi paradigma hukum bagi para pengusungnya. Menolak mentah-mentah atas ketundukan hakim terhadap undang-undang, yang menempatkan hakim hanya sekedar pembunyi (corong) dari diktum-diktum yang ada dalam undang-undang, dan memecahkan masalah hukum dengan cara deduktif. Lahirnya aliran ini karena aliran legisme dirasa tidak dapat memenuhi kebutuhan dan ketidakmampuannya memecahkan persoalan-persoalan baru dalam hukum. Aliran ini lahir di Jerman pada abad ke 19-20 dengan tokoh utama Kantorwics. Selanjutnya kita dapat menggarisbawahi bahwa tujuan dari *Freie Rechtlehre* adalah: a) menyelenggarakan peradilan yang sebaik-baiknya dengan cara memberi kebebasan kepada hakim untuk tidak terikat kepada undang-undang tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari, dan b) membuktikan bahwa dalam undang-undang terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dilengkapi dan disempurnakan. Serta c) menugaskan kepada hakim agar memutuskan perkara dengan mendasarkan dirinya pada *rechtsidee* (cita keadilan).

c) Aliran *Rechtsvinding*

Aliran *Rechtsvinding* atau penemuan hukum merupakan suatu aliran yang posisinya berada diantara kedua aliran ekstrem di atas (antara legisme dan *freie rechtlehre*). Pada prinsipnya aliran *Rechtsvinding* berpendapat bahwa hakim tetap berpegang pada undang-undang tapi tidak seketat aliran legisme, karena hakim juga mempunyai kebebasan. Tapi kebebasan hakim tidak seperti anggapan aliran *Freie Rechtlehre*, sehingga dalam melakukan tugasnya hakim mempunyai apa yang disebut sebagai “kebebasan yang terikat” (*gebonded-vrijheid*) sekaligus juga “keterikatan yang bebas” (*vrije-gebondenheid*). Oleh sebab itu maka tugas hakim disebutkan sebagai upaya untuk melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) yang artinya adalah menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan zaman, dengan hal-hal konkrit yang terjadi dalam masyarakat dan bisa perlu menambah undang-undang yang disesuaikan pada asas keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Inti pandangan terbentuknya hukum dari aliran ini adalah bahwa hakim terikat dengan undang-undang, tetapi tidak seketat pada aliran Legisme yang hanya memposisikan hakim sebagai pembunyi undang-undang saja. Hakim diberikan kebebasan, namun kebebasan itu tidak sebatas dalam aliran *freire rechtlehre* (aliran hukum bebas), kebebasan yang terikat. Tugas hakim dalam aliran ini adalah menyelaraskan undang-undang dengan perkembangan dan perubahan zaman. Aliran *rechtsvinding* berkeyakinan bahwa jurisprudensi sangat penting keberadaannya dan bagus untuk dipelajari. Di sana dapat diketemukan metode memutuskan hukum hakim dan rasa keadilan yang diyakini oleh hakim. Keberadaan dan mempelajari undang-undang juga sama pentingnya dengan jurisprudensi, keberadaan undang-undang lebih menjamin pada kepastian hukum dan unifikasi hukum.

Menurut aliran *Rechtsvinding* hukum dapat dibentuk lewat cara-cara sebagai berikut: (a) lewat pembentukan peraturan perundang-undangan; (b) lewat interpretasi terhadap undang-undang, karena menganggap undang-undang itu belum mencakup persoalan hukum yang dihadapi dan pemikiran hakim tersendiri dalam sidang peradilan (*rechtpraak*); (c) lewat penjabaran dan penyempurnaan undang-undang oleh hakim dan; (d) lewat tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat (*living law*).

Dari uraian di atas, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa aliran *rechtsvinding* menempatkan yurisprudensi sebagai sumber hukum di samping undang-undang. Dengan asumsi seperti telah disebutkan di atas bahwa di dalam yurisprudensi terdapat makna hukum yang konkrit diperlukan dalam hidup bermasyarakat yang tidak dijumpai dalam kaidah yang terdapat pada undang-undang. Aliran *Rechtsvinding* berkeyakinan bahwa yurisprudensi sangat penting keberadaannya dan bagus untuk dipelajari. Di sana dapat ditemukan metode memutuskan hukum hakim dan rasa keadilan yang diyakini oleh hakim. Keberadaan dan mempelajari undang-undang juga sama pentingnya dengan yurisprudensi, keberadaan undang-undang lebih menjamin pada kepastian hukum dan unifikasi hukum.

Dengan memahami ketiga aliran hukum di atas, timbul pertanyaan yang mendasar, aliran hukum apakah yang berlaku di Indonesia? Hal ini penting untuk diungkapkan sebagai dasar atau pedoman disaat yurisprudensi dibutuhkan pada praktik peradilan yang berguna untuk menciptakan hukum baru demi keadilan yang berpihak pada masyarakat. Meskipun tidak secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia menganut aliran *rechtsvinding* atau penemuan hukum, tetapi ada beberapa hal yang dapat kita pakai untuk menengarai bahwa dalam kenyataannya hukum positif Indonesia diwarnai oleh aliran *rechtsvinding*. Misalnya, apabila kita hubungkan dengan macam-macam sumber hukum formil Indonesia, kita akan menemukan bahwa undang-undang atau peraturan perundangan merupakan sumber utama dalam sistem hukum nasional Indonesia, diikuti kemudian dengan kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian, dan doktrin. Uraian di atas dapat kita pakai sebagai salah satu penanda bahwa hukum positif Indonesia di warnai oleh aliran *Rechtsvinding*, yang memberi keleluasaan pada hakim untuk tidak hanya mengandalkan undang-undang, melainkan bisa menggali hukum dari sumber lain, misalnya dari yurisprudensi.

Bisa melihat pada peraturan hukum yang pernah dan tengah berlaku di Indonesia, kita dapat mengatakan dengan tegas bahwa Indonesia menganut sistem *Rechtsvinding*. Buktinya dapat kita temukan dalam peraturan perundangan yang pernah berlaku pada zaman Hindia-Belanda dengan singkatan AB (*Algemeen Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia*). Pada Pasal 20 AB dinyatakan “*hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang*” dan pada Pasal 22 AB dinyatakan bahwa “*hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas dan tidak*

lengkap, maka ia dapat dituntut atau dihukum karena menolak mengadili". Pada masa sekarang dapat dilihat dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 28 ayat 1 sebagai berikut:

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", (Pasal 16 ayat 1).

"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" (Pasal 28 ayat 1).

Aliran *Rechtsvinding* sepertinya sebagai jembatan dari dua aliran ekstrim sebelumnya, namun pada praktiknya bukan persoalan mudah menyelaraskan aturan perundangan dengan kebebasan berfikir hakim dalam menyelesaikan kasus hukum. Dari ketentuan tersebut, dapat kita tengarai bahwa Pengadilan atau Hakim dalam sistem hukum Indonesia, aktif berperan di dalam menemukan hukum atau membentuk hukum baru. Dengan demikian, Pengadilan atau hakim itu merupakan unsur yang cukup penting tidak saja dalam *menemukan hukum* tetapi juga dalam *mengembangkan hukum*. Jelaslah bahwa pengadilan mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia. Karena mereka melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan kata lain hakim atau pengadilan dalam sistem hukum Indonesia yang pada dasarnya tertulis itu mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*). Karena itu sistem hukum Indonesia, walaupun merupakan sistem hukum tertulis juga merupakan sistem yang terbuka.

Memahami akan peranan yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia, pada kali ini dapatlah disimpulkan, bahwa yurisprudensi dapatlah dipandang sebagai jalan untuk menciptakan hukum baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat (zaman), disaat aturan hukum tertulis tidak lagi menjangkau perkembangan zaman yang begitu cepat dan kompleks. Pada akhirnya terjadilah kekosongan hukum, maka di sinilah peran hakim diberikan kebebasan untuk menggali dan menciptakan hukum baru yang selaras dengan perkembangan masyarakat, dengan mendasarkan pada kemaslahatan umat dan berpedoman pada nilai-nilai sosial yang tumbuh pada masyarakat. Di samping untuk menciptakan rasa keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia seagai *spirit* peran hakim dalam mengembangkan yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia.

b. Eksistensi Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia

Sebagai suatu wujud penemuan hukum, dasar yang biasa dijadikan rujukan bagi lahirnya yurisprudensi adalah Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Maksud yang terkandung dari Pasal itu adalah agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berkaitan dengan asas *iura curia novit*. Sehubungan dengan itu ada beberapa fungsi yurisprudensi, yaitu: (a) menciptakan standar hukum (*to settle law standard*); (b) menciptakan kesatuan landasan hukum yang sama (*unified legal framework*) dan kesatuan persepsi hukum yang sama (*unified legal opinion*); (d) menciptakan kepastian hukum; (e) mencegah terjadinya disparatis putusan pengadilan. Senada dengan pendapat M. Yahya Harahap tersebut di atas, Jazim Hamidi dan Winahyu Erwiningsih menyatakan secara lebih spesifik bahwa yurisprudensi selain sebagai sumber hukum, dalam dunia peradilan mempunyai beberapa fungsi, diantaranya: (1) menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam kasus/perkara yang sama atau serupa, dimana undang-undang tidak mengatur hal itu; (2) menciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat dengan adanya standar hukum yang sama; (3) menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dapat diperkirakan (*predictable*) pemecahan hukumnya; (4) mencegah kemungkinan terjadinya disparatis perbedaan dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama, sehingga kalau terjadi perbedaan putusan antara hakim yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama, maka jangan sampai menimbulkan disparatis tetapi hanya bercorak sebagai variabel secara kasuistik; (5) dengan demikian dapat dikemukakan bahwa yurisprudensi adalah manifestasi penemuan hukum.¹²

Yurisprudensi sekalipun memiliki fungsi yang penting namun tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas di Indonesia, baik dalam tataran teori dan praktik. Bismar Siregar mengemukakan meskipun secara historis Indonesia mempunyai kedekatan keluarga dengan sistem hukum *civil law* melalui zaman penjajahan Belanda, namun belum ada pengertian baku mengenai apakah yang dimaksud dengan yurisprudensi itu.¹³ Menurut Jimly Asshiddiqie kendati kedudukan yurisprudensi adalah sedemikian penting namun peranan yurisprudensi belum mendapat perhatian yang cukup, baik dalam pengajaran hukum maupun dalam praktik hukum, karena disebabkan beberapa faktor yakni: *Pertama*, sistem pengajaran hukum kurang sekali menggunakan putusan hakim atau yurisprudensi sebagai bahan bahasan, yang disebabkan: (1) pengajaran hukum lebih menekankan penguasaan pengertian umum hukum, bersifat abstrak dalam bentuk generalisasi teoritik belaka; (2) sistem hukum yang berlaku menempatkan asas dan kaidah hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama hukum yang berlaku, dan kurang memperhatikan pengertian atau tafsiran baru atas ketentuan peraturan perundang-undangan melalui yurisprudensi; (3) publikasi yurisprudensi sangat terbatas sehingga tidak mudah untuk didapat dan dipelajari/dibahas; dan (4) kebijakan penelitian hukum yang memberi ke lapangan

¹² Jazim Hamidi dan Winahyu Erwiningsih, *Yurisprudensi tentang Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2000), 7-8.

¹³ Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 19.

fasilitas untuk penelitian putusan hakim atau yurisprudensi.¹⁴ *Kedua*, dari segi praktik hukum, putusan hakim atau yurisprudensi *legally non binding*, karena sistem hukum Indonesia tidak menjalankan sistem *presedent*.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/1972 tentang Pengumpulan Yurisprudensi, ditentukan bahwa demi terwujudnya kesatuan hukum maka hanya MA satu-satunya lembaga konstitusional yang bertanggungjawab mengumpulkan yurisprudensi yang harus diikuti oleh hakim dalam mengadili perkara. Surat Edaran tentang Pengumpulan Yurisprudensi tersebut sampai saat ini belum pernah dicabut oleh MA dan masih tercantum dalam Himpunan SEMA dan Perma Tahun 1951-2007 yang diterbitkan oleh MA pada tahun 2007, dengan demikian masih berlaku dan menjadi pedoman dalam pengumpulan, penerbitan dan publikasi yurisprudensi. Selanjutnya dengan memperhatikan isi atau substansi dari SEMA No. 2/1972 tersebut, aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian adalah: (a) Wewenang dan tanggungjawab konstitusional untuk mengumpulkan yurisprudensi hanya ada pada MA, institusi di luar MA baik Pemerintah maupun swasta tidak mempunyai wewenang, kecuali telah dibicarakan terlebih dahulu; (b) tujuan dari wewenang dan tanggungjawab konstitusional tersebut adalah untuk menjaga *eenheid in de rechtspraak* (kesatuan/keseragaman peradilan); (c) suatu putusan baru mempunyai sifat *richt-lijn* (pedoman/petunjuk yang harus diikuti oleh hakim dalam mengadili perkara) adalah perkara-perkara yang di tingkat kasasi telah diteguhkan hukumnya baik dengan mengadili sendiri maupun dengan menolak kasasi; (d) putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa melalui kasasi tidak mempunyai sifat *richt-lijn*.¹⁵

Yurisprudensi yang dalam sistem hukum di Indonesia bukanlah merupakan sebagai sumber hukum yang utama, melainkan hanya dapat berfungsi apabila dalam sumber hukum tertulis (*Lex scripta*) tidak mengatur kasus/masalah tersebut. Anehnya meski telah diatur demikian, penerapan pemberlakuan hukum dalam sistem hukum di Indonesia masih muncul kerancuan hukum. Pada praktiknya salah satu contoh anomali penerapan Yurisprudensi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang membolehkan terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*) jaksa penuntut umum dapat melakukan upaya hukum kasasi terhadapnya.

Sedangkan dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “*Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas*”. Jelas sudah, berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP tersebut pada kalimat terakhir bagian akhir, secara yuridis normatif KUHAP telah menutup jalan bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *et.al*, *Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan*, (Malang: Setara Press, 2016), 34-37.

¹⁵ Teguh Satya Bhakti, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Putusan-Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017), 104.

Dalam praktik peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan yang diawali oleh pihak Eksekutif, yakni pada saat itu oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03 tanggal 10 Desember 1983 tentang tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP yang dalam butir 19 pada lampiran ditetapkan bahwa “*terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, kondisi dan demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada Yurisprudensi*”¹⁶. Keberadaan yurisprudensi yang keluarnya didasarkan pada keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 14-PW. 07. 03 tahun 1983 tersebut dalam bidang substansi masih selalu menjadi wacana dan perdebatan kalangan teoritis maupun praktisi. Berikut adalah beberapa fakta yuridis mengenai yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum terhadap Kasasi atas putusan bebas, diantaranya:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 275 K/Pid/1983, atas nama terdakwa Raden Sonson Natalegawa.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 579 K/Pid/1983 atas nama Moses Mairulli.
3. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 812 K/Pid/1984 atas nama Drs. Muhr Saleh.
4. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1164 K/Pid/1985 atas nama Tony Gozal.
5. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1164 K/Pid/1985 atas nama Tony Gozal.¹⁷

Yurisprudensi di atas adalah sebagai contoh kasus-kasus dari sebagian kecil upaya Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan hakim yang mengandung pembebasan (*Vrijspraak*) dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Ikhwal diafirmasinya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas tidak lain disandarkan kepada asas hukum yang mendalilkan bahwa peraturan yang tidak adil tidak perlu dipatuhi (*ius contra legem*). Selanjutnya secara defenitif asas tersebut dipositifkan di dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW. 07. 03. Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Namun persoalannya adalah tidak sesedarhana itu, di dalam era reformasi hukum yang berobsesi untuk mewujudkan paradigma negara hukum yang demokratis dengan bersendikan prinsip trias politika, yakni prinsip checks and balances, maka legalitas yurisprudensi tetap (yurisprudensi yang wajib diikuti oleh hakim yang kemudian, sebab telah dirujuk berulang-ulang dan penerapannya berlangsung efektif) sebagai dasar pijakan untuk mengesampingkan produk hukum undang-undang (KUHP) patut dipertanyakan validitasnya. Pada masa lalu ijtihad atau *rechtvinding* yang dilakukan oleh MA melalui instrumen yurisprudensi untuk mengisi kevakuman hukum bahkan kerap kali menganulir materi peraturan setingkat undang-undang berdasar dalil *ius contra legem*

¹⁶ Abdul Hakim, et. al, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1986), hlm. 338.

¹⁷ Leden Marpaung, *Putusan Bebas Masalh dan Pemecahannya*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1995), 72-88.

memang dapat dimaklumi. Pasalnya, sistem hukum ketatanegaraan kita sebelum era reformasi tidak mengenal pranata uji materi terhadap peraturan setingkat UU. Instrumen review itu pun kalau ada baru sebatas kepada peraturan di bawah UU, dan yang memiliki otoritas untuk melakukannya tidak lain adalah MA. Oleh karena itu wajar jika kemudian MA tidak saja berperan sekedar corong Undang-Undang belaka, melainkan berinisiatif untuk melakukan temuan dan terobosan hukum melalui keputusan-keputusannya di pengadilan (*judge mae law*).

Namun saat ini legal reasoning yang digunakan untuk menjustifikasi yurisprudensi MA atas dasar *ius contra legem* dapat mengabaikan Undang-Undang, jelas sudah tidak relevan lagi bahkan inskonstitusional. Sebab menurut konstitusi, Undang-Undang hanya dapat dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan bukan oleh MA. Hal ini juga bertentangan dengan semangat Asas Kepastian Hukum sebagaimana tertuang dalam Konstitusi kita yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

D. SIMPULAN

Peranan dan eksistensi yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia, sangatlah jelas sebagaimana dilandaskan secara yuridis yakni dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 28 ayat 1 sebagai berikut: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” (Pasal 16 ayat 1). “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” (Pasal 28 ayat 1). Ini sebagai peluang bahwa peranan dan eksistensi yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia telah diakui, sehingga memberikan kebebasan pada hakim untuk memutus sebuah perkara walaupun tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya, namun ini semua dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum dan untuk menciptakan hukum baru yang memberikan rasa keadilan pada semua rakyat.

Dengan demikian, peranan hakim sangat penting tidak hanya dalam menemukan hukum tetapi juga dalam mengembangkan hukum. Jelaslah bahwa peran hakim mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum di Indonesia. Karena hakim menjalankan fungsinya yang pada dasarnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtvorming*) dan penemuan hukum (*rechtvinding*). Dengan kata lain hakim atau pengadilan dalam sistem hukum Indonesia yang tunduk pada hukum tertulis akan tetapi mempunyai fungsi atau kewenangan membuat hukum baru (*creation of new law*). Oleh sebab itu walaupun hukum Indonesia, merupakan sistem hukum tertulis, akan tetapi dilain sisi merupakan sistem hukum yang terbuka.

E. SARAN

Setelah memahami uraian di atas, maka saran ini ditunjukkan *pertama*; pada para hakim diharapkan mampu untuk menciptakan hukum-hukum yang baru selain hukum yang tertulis, sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya demi

kemaslahatan rakyat, karena inilah konsekuensi dari yurisprudensi yang memberikan kebebasan pada hakim dalam menangani sebuah perkara yang ada sesuai dengan landasan UU Kekuasaan Kehakiman yang berlaku. *Kedua*; pada pemerintah harus mendukung peran hakim dalam menciptakan atau membuat hukum baru dengan membuat sebuah regulasi yang tegas tentang hak dan kewajiban maupun kewenangan kebebasan hakim guna mengarahkan yurisprudensi sebagai sumber hukum formil maupun materil pada sistem hukum Indonesia. Dan *ketiga*; para akademisi dan praktisi hukum diharapkan mampu untuk memahami yurisprudensi tidak hanya sebagai kaidah ilmu hukum namun lebih jauh yurisprudensi dijadikan sebagai sumber hukum dalam praktik peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, dkk. *Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan*. Malang: Setara Press, 2016.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid II. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Bhakti, Teguh Satya. *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Putusan-Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017.
- Dahlan, Abdul Azis, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam Indonesia*. Jilid II Cet. I. Jakarta: PT Ihtiar Baru-van Hoeve, 1996.
- Dirdjosisworo, Sudjono. *Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- Hakim, Abdul et. al. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1986.
- Hamidi, Jazim dan Winahyu Erwiningsih. *Yurisprudensi tentang Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2000.
- Lotulung, Paulus Efendie. *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997/1998.
- Marpaung, Leden. *Putusan Bebas Masalh dan Pemecahannya*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1995.
- Mertokusumo, Soedikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Siregar, Bismar. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1993.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, 1990.